

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2020). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Azizy Qodri, Dkk. (2012). *MENGGAGAS HUKUM PROGRESIF INDONESIA*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Burhanuddin, (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media pustaka
- Efendi, J., & Ibrahim, J., (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hananta, D. (2017). *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kansil, C.S.T Dan Kansil, Cristine, (2003). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kenedi, J. (2020). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Siste Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *MENGENAL HUKUM SUATU PENGANTAR*. YOGYAKARTA: CV. MAHA KARYA PUSTAKA.

- Moeljatno. (2015). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. JAKARTA: PT RINEKA CIPTA.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nassaruddin, E, H. (2016). *KRIMINOLOGI*. Bandung: Pustaka Setia Bandung
- Pangaribuan, L. M. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pujiono. (2023). *Pemikiran Kontemporer Pembaruan HUKUM PIDANA INDONESIA*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2009). *PENEGAKAN HUKUM; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Pubhling.
- Rahmad, R.A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Roejito, & Winahyu, F.R. (2014). *Problematika Hukum dan Peradilan*, Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Shalihah, F. (2019). *ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Solikin, N. (2019). *HUKUM, MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM*. Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA.
- Sugianto. (2008). *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Grasindo.
- Surono, (2013). *Bahan Ajar Teknis Cukai*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutendi, A. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Utsman, S. (2010). *MENUJU PENEGAKAN HUKUM RESPONSIF*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Wantu, F.M. (2015). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Gorontalo: Reviva Cendekia.

Yoserwan, & Mulyati, N. (2021). *HUKUM PIDANA EKONOMI*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Zed, M. (2010). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Rajawali press.

### **Jurnal**

Ananda, A. D., & Dewi, G. A. (2023). Kewenangan PPNS DJBC Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal D Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11. 1624.

Anita. (2022). POLITIK HUKUM DALAM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2, 321-333.

Ariyanti, V. (2018). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 5,98-113.

Astuti, M.T., Sudirman, L., & Girsang J. (2022). Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10, 68-69.

Jalaludin, & Ulfyani, N. (2020). PENJUALAN KONSINYASI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN PENENGAN DI KOTA LHOKSEUMAWE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 6, 190-211.

Motulo, H. P., Dkk. (2020). UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. *Lex Administratum*, VIII, 149-158.

- Putri, Nyoman., sugiartha, I Nyoman., Karma, Ni Made (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, Hal. 172.
- Pranoto, D. S. (2016). Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Cukai. *Warta Bea Cukai*, Vol 48. 1-84.
- Samuel. (2022). PERAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM MENCAPAI TUJUAN PENGENAAN CUKAI. *Jurnal BPPK*, 15, 01-15.
- Saputra, A.O., Mahardika, S.E., & Pujiono. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UNTUK MENGURANGI *OVERCROWSES* LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA PANDEMI COVID 19. *Jurnal USM Law Review*, 4, 332-333.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusi Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). *Majalah Hukum Nasional*, 48, 4.
- Susanto, S.N. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 126-142.
- Yumanto, B., & Hutauruk, P. A. (2022). ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA PAJAK: TEORI DAN PRAKTIK. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4, 107-149.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan No 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK-010/22 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Dan Tembakau Iris.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.01/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-12/BC/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023.

### **Karya Ilmiah**

- Basir, Abdul. (2021). **ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN PAJAK DAN UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA.** Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.
- Ilham, Dede. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa pita Cukai Di Kota Pekanbaru.* Progran Magister Ilmu (S2) Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas islam Riau.
- Herdianto, Rizky. (2020). *Implementasi Pasal 8 dan Pasal 9 PERMENKEU RI Nomor 7/PMK.-7/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat.* Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kriestiantoro, Vincensius Guido. (2023). *Penerapan Undang-Undang Cukai Dalam Mendorong Kepatuhan Pengusaha Pabrik Rokok Membayar Cukai*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Sumber Lain**

Muhammady, D. A. (2023, September 08). Kemenkeu Learning Center. kemenkeu.go.id: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kenali-rokok-ilegal-3fc89c5c/detail/> diakses tanggal 15 Oktober 2024.

Fahriza, F. (2023, Desember 5). Temuan Rokok Ilegal di DIJ Tembus 134 Kasus. Radar Jogja. <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/653436714/temuan-rokok-ilegal-di-dij-tembus-134-kasus> diakses tanggal 26 Desember 2023